

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Permasalahan *youth unemployment* merupakan permasalahan yang kompleks. Digitalisasi hingga pandemi yang melanda tentunya membuat permasalahan tersebut semakin memburuk. Jumlah *youth unemployment* yang terus mengalami peningkatan menjadikan permasalahan tersebut sebagai urgensi yang perlu untuk diselesaikan mengingat kondisi jumlah angkatan kerja dan jumlah masyarakat muda Indonesia yang surplus tentunya *youth unemployment* menjadi kekhawatiran dan permasalahan yang patut untuk diseriusi.

Kondisi perekonomian yang berubah akibat globalisasi dan revolusi industri mengubah akar permasalahan pengangguran bukan lagi dari kurangnya lapangan kerja melainkan tidak selarasnya keahlian yang dimiliki sumber daya manusia Indonesia dengan yang dibutuhkan di pasar kerja. *Missmatch skill* tersebut muncul sebagai akibat kurang tepatnya upaya pembangunan sumber daya manusia. Berfokusnya pemerintah terhadap sisi *supply* tenaga kerja menjadikan aspek kualitas dan analisis pasar terabaikan. Produksi tenaga kerja yang tanpa kualitas dan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja pada akhirnya berimbas pada penumpukan tenaga kerja yang mengarah pada tingginya angka pengangguran.

Pendekatan *link and match* yang digunakan dalam proyek BTF terbukti mampu untuk mengatasi *youth unemployment*. Di era digitalisasi, fasilitas pelatihan digital merupakan hal yang paling dibutuhkan bagi angkatan kerja untuk dapat bersaing. Penyaluran kerja dalam program BTF menunjukkan bahwa kaum muda juga tidak hanya membutuhkan pelatihan sebagai modal melamar pekerjaan tapi *mentoring* dan pemberian informasi terkait pekerjaan mengingat kurangnya pengalaman dan juga terbatasnya *networking* anak-anak muda saat pertama kali memasuki pasar kerja.

Kerangka kerja sama MSP mampu untuk digunakan dalam rangka kerja sama mengatasi isu-isu permasalahan masa sekarang yang cenderung lebih kompleks dan membutuhkan lebih dari dua aktor dalam penyelesaiannya. Dalam penyelenggaraan

BTF, dari 30 mitra yang ditargetkan, pihak penyelenggara berhasil mencapai kesepakatan kerja sama dengan 25 perusahaan dan 2 lembaga pemerintah. Banyaknya aktor yang terlibat dalam MSP nyatanya membawa keuntungan dan dinilai sesuai dengan kondisi permasalahan saat ini yang cenderung membutuhkan lebih banyak aktor beragam dalam upaya penyelesaiannya. Kerja sama antara Plan Internasional Indonesia dan Asean Foundation dalam penyelenggaraan proyek BTF didominasi oleh pola interaksi politik dan kognitif. Dimana pertukaran sumber daya dan informasi beserta pengambilan keputusan bersama dilakukan secara berkala dan cukup intens. Perbedaan peran kedua aktor dalam setiap tahapan kerja sama menggambarkan bahwa kerangka MSP bersifat fleksibel dan memudahkan bagi aktor untuk mengambil peran yang berbeda sesuai dengan sumber daya yang dimiliki di setiap tahapan.

Kemampuan untuk menjangkau target program yang sering kali gagal dilakukan dalam upaya pencapaian pembangunan nyatanya mampu diatasi dalam skema kerja sama MSP di penyelenggaraan BTF karena tidak hanya bekerja sama dengan aktor besar seperti pemerintah dan perusahaan tapi juga NGO dan juga institusi pendidikan lain yang mampu untuk menjangkau target pembangunan yakni anak muda. Berdasarkan hasil penelitian, dari sebanyak 5.200 peserta yang ditargetkan, terdapat sebanyak 4.342 anak muda yang mendapatkan pelatihan dengan 1.549 diantaranya telah mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut menggambarkan bahwa penggunaan kerangka MSP dalam kerja sama penyelenggaraan BTF merupakan hal yang tepat. Dari dan bisa menjadi contoh bagi upaya pencapaian tujuan SDGs lainnya.

6.2 Saran

Saran Praktis

Permasalahan *youth unemployment* sudah cukup memeras perhatian pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun lamanya. Perubahan kondisi perekonomian yang dinamis menjadi salah satu faktor mengapa upaya pemerintah Indonesia masih kurang tepat dalam mengatasi isu tersebut. Pertama, arah kerja sama dalam penyelesaian isu masih sering kali terpaku pada asumsi lama

pembangunan yakni bertumpu pada kuantitas yang merupakan imbas dari tingginya angka penduduk usia produktif dan juga tuntutan peningkatan level pendidikan masyarakat sementara disisi lain persaingan pasar kerja tidak lagi mengandalkan level pendidikan sebagai satu-satunya modal. Kedua, rendahnya kebijakan yang berfokus pada sisi *demand* sehingga menghasilkan kebijakan dan juga hasil yang tidak sinkronnya antar keahlian yang dibekalkan pada penduduk dengan kebutuhan di pasar kerja yang mengakibatkan penumpukan angkatan kerja.

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, diperlukan adanya perbaikan dalam upaya pengentasan *youth unemployment* di Indonesia. Pertama, perlunya peningkatan sisi *demand* pasar kerja. Kondisi pasar kerja yang semakin dinamis tentunya berbanding lurus dengan *demand*. Oleh karena itu, diperlukan lagi peningkatan khususnya bagian research dan development baik dalam merumuskan kebijakan baru maupun dalam evaluasi program dan kebijakan yang sedang berjalan dalam mengatasi *youth unemployment*. Kedua, sinkronisasi dengan segala pihak yang terlibat. Kerja sama MSP dibutuhkan baik untuk kerja sama jangka panjang maupun pendek. Sinkronisasi diperlukan baik dari sisi kebijakan dan program, lembaga pendidikan dan pelatihan dan juga perusahaan sebagai penyerap tenaga kerja. Ketiga, mengedepankan link dan match. Sebagaimana hasil penelitian dibab sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan lain anak muda sulit terserap kepasar kerja selain karena tidak sinkronya keahlian adalah kurangnya pengetahuan mengenai ketersediaan lowongan kerja dan kurang familiarnya anak muda dengan proses rekrutmen. Dengan itu selain pada persiapan peningkatan keahlian dan juga job fair, diperlukan adanya program mengenai mentoring yang mampu untuk membimbing anak muda dalam masa transisi di pasar kerja.

Saran Teoritis

Kerja sama Multi-Stakeholder Partnership merupakan studi kasus yang menarik karena selain menjadi bentuk kerja sama baru dalam pembangunan, keterlibatan aktor yang beragam dapat menjadi sumber yang beragam untuk dijadikan topik penelitian. Meskipun telah banyak upaya kerja sama MSP yang dilakukan, penelitian mengenai topik tersebut khususnya dalam pembangunan masih sedikit khususnya di Indonesia. Penggunaan teori institutional interaction

juga masih jarang digunakan apalagi bagi penelitian kerja sama pembangunan di Indonesia.

Sebagai negara berkembang, upaya pembangunan tentunya masih sangat membutuhkan banyak perbaikan. Dengan itu, penelitian lanjutan maupun baru mengenai kerja sama MSP akan sangat dibutuhkan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan dan juga efektivitas kerja sama. Sejalan dengan itu, penggunaan institutional relation terkhusus dalam dunia kerja sama hubungan internasional juga perlu untuk dilakukan mengingat masih sangat sedikit penelitian yang mengadopsi teori tersebut untuk membedah kerja sama dan juga interaksi institusi yang menjadi esensi dalam dunia hubungan internasional.